



**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**

**Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

Daftar Isi

Halaman

Surat Pernyataan Pengurus

Laporan Auditor Independen

**Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Penghasilan Komprehensif	2
Laporan Perubahan Aset Neto	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5

**Surat Pernyataan Pengurus
Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
Program Pendanaan Usaha Mikrol dan Usaha Kecil
PT Kereta Api Indonesia (Persero)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Nama | : | Agus Setijono |
| Alamat Kantor | : | Jl. Perintis Kemerdekaan N0. 1 Bandung |
| Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain | : | Jl. Bukit Watuwila I Blok G.IV/8 RT 003/011 Kel. Bringin Kec. Ngaliyan |
| Nomor Telepon | : | +62 813-2535-3517 |
| Jabatan | : | PYMT Vice President Corporate Social Responsibility |

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Kereta Api Indonesia (Persero);
2. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik;
3. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
4. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material;
5. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Program PUMK PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bandung, 22 April 2024



Agus Setijono
PYMT Vice President Corporate Social Responsibility

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Registered Public Accountants

Nomor : 00736/2.1030/AU.2/12/0645-2/0/IV/2024

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 215140 1340
F +62 215140 1350

www.rsm.id

Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi, serta
Pengelola Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("Program"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset neto dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

Basis Opini

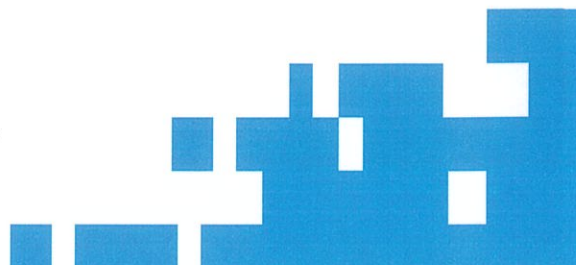
Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Program berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Pengelola dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Pengelola Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Pengelola untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan, Pengelola bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Program dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Pengelola memiliki intensi untuk melikuidasi Program atau menghentikan operasi atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan, termasuk pelaporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.



Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Program.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh pengelola.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh pengelola dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Program untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Program tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan



Dedy Sukrisnadi

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0645

Jakarta, 22 April 2024

00736/2.1030/AU.2/12/0645-2/0/IV/2024



PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
LAPORAN POSISI KEUANGAN
 Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Bank	4	1.014.880.849	148.665.914
Piutang Pinjaman Mitra Binaan, setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp7.288.055.393 pada tahun 2023 dan Rp5.311.429.264 pada tahun 2022	5	9.408.260.452	15.683.599.431
Piutang Lain-lain Bersih, setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp264.929.995 pada tahun 2023 dan Rp102.979.130 pada tahun 2022	6	750.004.324	911.955.189
JUMLAH ASET LANCAR		11.173.145.625	16.744.220.534
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang kolaborasi kepada BRI	7	5.620.336.043	1.800.000.000
Piutang Bermasalah, setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp2.956.653.606 pada tahun 2023 dan Rp2.893.250.334 pada tahun 2022	8	--	--
JUMLAH ASET		16.793.481.668	18.544.220.534
LIABILITAS DAN ASET NETO			
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Kelebihan Pembayaran Angsuran	9	41.341.153	35.995.471
ASET NETO			
Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	10	16.752.140.515	18.508.225.063
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO		16.793.481.668	18.544.220.534

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Dalam Rupiah Penuh)

	<u>Catatan</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA			
PENDAPATAN			
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	11	301.368.346	440.512.490
Pendapatan Bunga Bank	12	7.391.860	14.828.170
Pendapatan Lain-lain	13	426.545.629	690.566.537
JUMLAH PENDAPATAN		735.305.835	1.145.907.197
BEBAN			
Beban Penyisihan Piutang	14	2.487.174.023	707.188.797
Beban Penghapusan Piutang	15	--	268.524.753
Beban Administrasi Umum	16	4.216.360	5.592.954
JUMLAH BEBAN		2.491.390.383	981.306.504
(PENURUNAN) KENAIKAN ASET NETO		(1.756.084.548)	164.600.693
DENGAN PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		--	--
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		--	--
JUMLAH PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF LAIN		(1.756.084.548)	164.600.693

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Dalam Rupiah Penuh)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ASET NETO TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
Saldo Awal	18.508.225.063	18.343.624.370
Surplus (Defisit)	(1.756.084.548)	164.600.693
SALDO AKHIR	<u>16.752.140.515</u>	<u>18.508.225.063</u>
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	--	--
ASET NETO DENGAN PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA	--	--
JUMLAH ASET NETO	<u><u>16.752.140.515</u></u>	<u><u>18.508.225.063</u></u>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Dalam Rupiah Penuh)

	<u>Catatan</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
AKTIVITAS OPERASI			
KAS DITERIMA DARI:			
Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan		4.376.661.450	6.447.461.708
Penerimaan Jasa Administrasi Pinjaman		281.032.303	500.893.909
Pendapatan Bunga Bank	12	7.391.860	14.828.170
Kelebihan Pembayaran Angsuran		5.345.682	4.781.295
JUMLAH PENERIMAAN		4.670.431.295	6.967.965.082
KAS DIKELUARKAN UNTUK:			
Penyaluran Pinjaman Kemitraan		--	(5.266.650.000)
Beban Administrasi dan Umum	16	(4.216.360)	(5.592.954)
Penyaluran Kolaborasi BRI	8	(3.800.000.000)	(1.800.000.000)
JUMLAH PENGELUARAN		(3.804.216.360)	(7.072.242.954)
KAS BERSIH DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS OPERASI		866.214.935	(104.277.872)
AKTIVITAS INVESTASI		--	--
AKTIVITAS PENDANAAN		--	--
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH BANK BANK PADA AWAL TAHUN		866.214.935 148.665.914	(104.277.872) 252.943.786
BANK PADA AKHIR TAHUN		1.014.880.849	148.665.914

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Dalam Rupiah Penuh)

1. Umum

1.a. Pendirian dan Informasi Umum

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN (Program TJSL BUMN) adalah kegiatan yang merupakan komitmen perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan.

Pelaksanaan Program TJSL BUMN berorientasi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) serta berpedoman kepada ISO 26000 sebagai panduan pelaksanaan program, dengan harapan pelaksanaan Program TJSL BUMN yang lebih terukur, berdampak dan berkelanjutan. PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai salah satu BUMN jasa logistik turut serta menyukseskan program-program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan yang sejalan dengan arahan dari Kementerian BUMN.

Selain itu untuk mendorong kegiatan pertumbuhan dan terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, pemerintah menganggap perlu mengembangkan para pelaku usaha mikro, kecil dan koperasi agar menjadi tangguh dan mandiri, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mendorong tumbuhnya kemitraan antara BUMN dengan pelaku usaha mikro, kecil dan koperasi.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) ikut melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan mulai tahun 1996 yang semula disebut Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), pada saat itu dinamakan Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) sekarang menjadi Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK), dengan wilayah meliputi Provinsi: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur. Pada tahun 2021, perubahan nama menjadi Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/04/2021, tanggal 8 April 2021, tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: PER.U/KO.104/II/2/KA-2019, tanggal 13 Februari 2019, tentang Perubahan atas Peraturan Direksi Nomor: PER.U/KO.104/I/3/KA-2018 tentang Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Perusahaan. Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di bawah pembinaan Direktur Utama dan Sekretaris Perusahaan, sedangkan pengelolaan di daerah dibentuk Komite TJSL Daerah secara fungsional sesuai Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: PER.U/KP.502/VI/1/KA-2022 tanggal 16 Juni 2022 perihal Perubahan atas Peraturan Direksi Nomor: PER.U/KP.502/X/1/KA-2019 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dengan tujuan agar pengelolaan TJSL lebih efektif dan efisien dengan prinsip *Good Corporate Governance*.

1.b. Kegiatan Utama

Kegiatan PUMK di lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dilakukan melalui jaringan kantor yang terdiri dari Kantor Pusat, 9 (sembilan) kantor Daerah Operasi dan 4 (empat) Divisi Regional dengan pembagian wilayah binaan dan jumlah mitra binaan pada 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Cabang / Pusat	Wilayah Binaan	31 Desember 2023 dan 2022
Sumatera	Komite TJSL di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Palembang, Tanjung Karang	279
DKI Jakarta	Komite TJSL di Jakarta	126
Jawa Barat	Komite TJSL di Bandung dan Cirebon	650
Jawa Tengah	Komite TJSL di Semarang dan Purwokerto	433
DI Yogyakarta	Komite TJSL di Yogyakarta	372
Jawa Timur	Komite TJSL di Madiun, Surabaya dan Jember	711
Jumlah Mitra Binaan		2.571

Pada 31 Desember 2023 penyaluran dana kemitraan melalui kolaborasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar 73 mitra.

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh)

Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Merupakan kegiatan penyaluran dana pinjaman bergulir untuk usaha mikro dan usaha kecil digunakan untuk:

- Membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan.
- Membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan.

1.c. Susunan Pengelola Program

Berdasarkan PER.U/KO/104/II/3/KA-2018 tanggal 9 Januari 2018, tentang Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Perusahaan PT Kereta Api Indonesia (Persero), secara rinci Susunan Pengelola Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023	2022
EVP Corporate Secretary	Raden Agus Dwinanto Budiadji	Asdo Artivyanto
VP Corporate Social Responsibility	Tatang Kusdiman	Bachoirullazi
Manager Partnership and Participations	Ichwan	Ichwan
Manager Community Relations	Noxy Citrea Bridara	Noxy Citrea Bridara

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Pada awal tahun 2012, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Meneg BUMN) menerbitkan Surat Edaran Meneg BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang "Penetapan Pedoman Akuntansi PKBL" dan Surat Edaran Meneg BUMN No. SE-01/D5.MBU/2012 tanggal 27 Maret 2012 tentang "Petunjuk Teknis Penerapan Pedoman Akuntansi PKBL Revisi 2012" yang berlaku bagi unit PKBL yang berada di bawah naungan BUMN Pembina. Kedua surat tersebut diterbitkan untuk mengubah pedoman penyusunan laporan keuangan PKBL yang sebelumnya diatur dalam Surat Edaran Meneg BUMN No. SE-04/MBU.S/2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang "Pedoman Akuntansi PKBL BUMN" untuk menyesuaikan dengan perkembangan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan PKBL didasarkan pada "Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)" sesuai dengan Surat Edaran Meneg BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan PKBL.

2.a. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan pengelolaan dana Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("PUMK") disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012 sesuai dengan Surat Edaran BUMN Nomor: SE-02/MBU/Wk/2012 tanggal 23 Februari 2012 yang bentuk penyajiannya mengacu pada Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35 (Revisi 2019) "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba" yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan keuangan pengelolaan dana PUMK disusun dalam mata uang rupiah, menggunakan konsep harga perolehan. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dan dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Laporan keuangan disusun menggunakan dasar akrual kecuali laporan arus kas disusun menggunakan dasar kas dengan menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas. Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, yang disusun menggunakan metode langsung (*direct method*).

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh)

Laporan keuangan PUMK Perusahaan meliputi:

- (i) Laporan Posisi Keuangan
Menyajikan informasi Aset, Kewajiban, dan Aset Neto PUMK pada periode tertentu.
- (ii) Laporan Penghasilan Komprehensif
Menyajikan kenaikan/penurunan Aset Neto pada tahun berjalan yang merupakan selisih antara dana yang diterima dengan penggunaan dana PUMK selama periode berjalan. Jumlah kenaikan/penurunan ini selanjutnya akan menjadi bagian dari Aset Neto pada periode berjalan.
- (iii) Laporan Perubahan Aset Neto
Menyajikan perubahan jumlah aset neto (Aset Neto Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya dan Aset Neto Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya) selama suatu periode yang mencakup organisasi secara keseluruhan.
- (iv) Laporan Arus Kas
Menyajikan laporan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan Arus Kas PUMK disusun dengan menggunakan metode langsung (*direct method*).
- (v) Catatan atas Laporan Keuangan
Setiap pos dalam Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, dan Laporan Arus Kas harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2.b. Bank

Merupakan rekening giro di bank yang digunakan untuk menampung seluruh transaksi penyaluran pinjaman dan operasional kegiatan kemitraan.

2.c. Piutang Pinjaman Mitra Binaan

Terdiri dari:

1. Piutang Bersih

Piutang bersih adalah jumlah piutang pinjaman mitra binaan dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang yang dihitung 2 (dua) tahun ke belakang. Penyaluran pinjaman kepada mitra binaan dicatat sebagai piutang sebesar nilai pokok pinjaman yang diberikan dikurangi dengan penerimaan angsuran pokok pinjaman. Jasa Administrasi dari pinjaman akan dicatat sebagai penghasilan pada periode diterimanya pendapatan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No: PER-01/MBU/03/2023, tanggal 3 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara besarnya Jasa Administrasi pinjaman dapat dirinci sebagai berikut:

- 3% (tiga persen) efektif per tahun;
- suku bunga flat (tetap) yang setara dengan 3% (tiga persen) efektif per tahun; atau
- ketentuan lain yang ditetapkan Menteri,
- prinsip jual beli, maka proyeksi margin yang dihasilkan disetarakan dengan margin sebesar jasa administrasi (Pembiayaan Syariah)
- prinsip bagi hasil, maka rasio bagi hasil yang diterima BUMN mulai dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen) berdasarkan perjanjian. (Pembiayaan Syariah) dengan jangka waktu/tenor pinjaman paling lama 3 (tiga) tahun.

2. Piutang Lain-lain Bersih

Piutang lain-lain bersih adalah jumlah piutang jasa administrasi dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang jasa administrasi yang dihitung 2 (dua) tahun ke belakang. Penyisihan Penurunan nilai Piutang dihitung sesuai tarif penyisihan menggunakan rata-rata persentase pergerakan piutang pinjaman mitra binaan berdasarkan umur tunggakan. Perhitungan persentase (%) tarif penyisihan akan berubah sesuai umur tunggakan.

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh)

2.d. Penyaluran Kolaborasi kepada BRI

Penyaluran kolaborasi kepada BRI merupakan penyaluran dana kemitraan melalui Kolaborasi dengan BRI berdasarkan surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No.S-721/MBU/11/2022 tanggal 10 November 2022 perihal Kerjasama Program PUMK.

2.e. Piutang Bermasalah

Piutang bermasalah disajikan sebesar Nilai Pokok Pinjaman. Besarnya Alokasi Penyisihan adalah sebesar 100% dari saldo Piutang Bermasalah.

2.f. Pengakuan Aset, Pendapatan, Liabilitas, dan Beban.

Aset, liabilitas, pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya walaupun penerimaan atau pengeluaran kas belum dilakukan oleh unit TJSL. Beban segera diakui dalam Laporan Aktivitas jika pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau sepanjang manfaat ekonomi masa depan tidak lagi memenuhi syarat untuk diakui dalam Laporan Posisi Keuangan sebagai Aset.

2.g. Aset Neto

Aset Neto diklasifikasikan menjadi Aset Neto Terikat dan Aset Neto Tidak Terikat. Aset Neto Terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu atau tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasional normal. Aset Neto Tidak Terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu.

2.h. Pendapatan

Jasa Administrasi Pinjaman

Mengungkapkan pendapatan jasa yang dipungut atas pinjaman dana Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) yang disalurkan kepada Mitra Binaan, termasuk Pinjaman Khusus.

Pinjaman yang diberikan kepada mitra binaan dibebankan bunga pinjaman atau jasa administrasi berdasarkan kelompok jumlah penyaluran pokok pinjaman sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN, ditetapkan per tahun sebesar 3% (tiga persen) dari limit pinjaman atau ditetapkan lain oleh Menteri.

Pendapatan Bunga Bank

Mengungkapkan pendapatan yang berasal dari bunga deposito, jasa giro, bunga tabungan atau bunga simpanan lainnya.

Pendapatan Lain-lain

Merupakan perkiraan yang menampung pendapatan PUMK yang tidak dapat dikategorikan pada pos lainnya termasuk pemulihan atas piutang.

2.i. Penyaluran, Beban dan Pengeluaran

Beban diakui pada saat terjadinya, sedangkan pengeluaran diakui pada saat kas keluar.

Beban Administrasi dan Umum

Merupakan beban-beban yang terjadi karena adanya biaya administrasi dalam transaksi bank dan juga beban yang berkaitan atas Pajak Penghasilan.

Dana Pembinaan Kemitraan

Merupakan jumlah dana yang dibayarkan dalam rangka pelaksanaan pembinaan kemitraan antara lain bantuan pendidikan, pelatihan, promosi, pengkajian dan penelitian, serta kegiatan lain.

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah Penuh)

3. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil sesuai dengan surat menteri BUMN No.S-170/MBU/03/2023 tanggal 21 Maret 2023 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan pada Kinerja Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-1/MBU/03/2023, tanggal 3 Maret 2023, tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, penggolongan kualitas pinjaman ditetapkan sebagai berikut:

- i) Lancar
apabila pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- ii) Kurang Lancar
apabila pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman telah melampaui 30 (tiga puluh) hari dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- iii) Diragukan
apabila pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- iv) Macet
apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

Pinjaman mitra binaan yang dikelompokkan sebagai piutang bermasalah yang timbul karena kahar (*force majeure*) sehingga tidak perlu dilakukan tindakan penyehatan pinjaman (tidak diperhitungkan) dalam perhitungan kinerja kolektibilitas piutang.

4. Bank

Bank terdiri dari rekening tabungan pada PT Bank Negara Indonesia Tbk atas program pendanaan usaha mikro dan usaha kecil dengan saldo pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.014.880.849 dan Rp148.665.914.

5. Piutang Pinjaman Mitra Binaan

Rincian Saldo Piutang pinjaman mitra binaan berdasarkan sektor usaha adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Sektor Perdagangan	6.595.591.032	8.513.822.555
Sektor Industri	3.441.763.991	4.756.390.735
Sektor Peternakan	2.036.154.117	2.212.217.364
Sektor Pertanian	1.972.795.659	2.234.093.922
Sektor Jasa	963.302.433	1.295.231.752
Sektor Perikanan	943.835.334	1.218.419.437
Sektor Lainnya	742.873.279	764.852.930
Jumlah	16.696.315.845	20.995.028.695
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(7.288.055.393)	(5.311.429.264)
Piutang Pinjaman Mitra Binaan	9.408.260.452	15.683.599.431

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Dalam Rupiah Penuh)

Piutang pinjaman mitra binaan berdasarkan Daerah Operasi (DAOP) dan Divisi Regional (DIVRE) sebagai berikut:

	2023	2022
DAOP 1 Jakarta	1.765.823.804	1.975.901.446
DAOP 2 Bandung	3.165.506.309	3.630.005.206
DAOP 3 Cirebon	1.389.731.916	1.703.241.491
DAOP 4 Semarang	952.770.407	1.405.864.030
DAOP 5 Purwokerto	901.262.589	1.212.158.874
DAOP 6 Yogyakarta	2.240.790.448	2.753.370.429
DAOP 7 Madiun	2.018.866.958	2.776.337.983
DAOP 8 Surabaya	991.591.496	1.296.884.549
DAOP 9 Jember	1.768.098.579	1.985.973.398
DIVRE I Sumatera Utara	250.690.098	474.958.837
DIVRE II Sumatera Barat	269.987.844	567.801.651
DIVRE III Palembang	361.081.769	412.150.187
DIVRE IV Tanjung Karang	620.113.628	800.380.614
Jumlah	16.696.315.845	20.995.028.695
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(7.288.055.393)	(5.311.429.264)
Piutang Pinjaman Mitra Binaan	9.408.260.452	15.683.599.431

Kualitas piutang pinjaman mitra binaan sebagai berikut:

2023				
Kualitas Pinjaman	Umur Piutang (Jatuh Tempo)	Saldo Piutang	Persentase Penyisihan	Cadangan Penurunan Nilai
Lancar	0 - 30	8.496.713.426	0,33% - 13,65%	1.159.847.374
Kurang Lancar	31 - 180	1.446.524.434	0,46% - 16,35%	236.446.942
Diragukan	181 - 270	1.039.620.647	0,70% - 17,15%	178.303.739
Macet	> 270	5.713.457.338	100%	5.713.457.338
Jumlah		16.696.315.845		7.288.055.393

2022				
Kualitas Pinjaman	Umur Piutang (Jatuh Tempo)	Saldo Piutang	Persentase Penyisihan	Cadangan Penurunan Nilai
Lancar	0 - 30	16.178.489.919	0,33% - 18,04%	1.618.966.227
Kurang Lancar	31 - 180	969.693.582	0,46% - 23,85%	142.631.602
Diragukan	181 - 270	334.056.722	0,70% - 27,47%	37.042.963
Macet	> 270	3.512.788.472	100%	3.512.788.472
Jumlah		20.995.028.695		5.311.429.264

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang mitra binaan sebagai berikut:

	2023	2022
Saldo Awal	5.311.429.264	5.538.690.853
Penambahan Tahun Berjalan (Catatan 14)	2.287.070.618	473.049.232
Pemulihan Tahun Berjalan (Catatan 13)	(242.039.550)	(643.487.102)
Reklasifikasi Cadangan Piutang Bersmasalah (Catatan 14)	(63.403.272)	--
Penyesuaian	(5.001.667)	(56.823.719)
Saldo Akhir	7.288.055.393	5.311.429.264

Penyesuaian merupakan dampak koreksi saldo piutang mitra yang tidak teridentifikasi. Atas koreksi saldo piutang tidak teridentifikasi tersebut, Pengelola tidak dapat melakukan penyesuaian pada kartu piutang melainkan melakukan penyesuaian pada cadangan kerugian penurunan nilai piutang tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp5.001.667 dan Rp56.823.719.

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Dalam Rupiah Penuh)

6. Piutang Lain-lain bersih

	2023	2022
Piutang Jasa Administrasi Pinjaman Bersih	750.004.324	764.855.189
Piutang Pembinaan	--	147.100.000
Saldo Akhir	750.004.324	911.955.189

Piutang Pembinaan merupakan biaya pembinaan yang sudah dikeluarkan dari dana PUMK dan dikembalikan ke BUMN pembina. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No: PER-05/MBU/04/2021 pasal 21 (b) bahwa biaya pembinaan menjadi bagian dari program TJSL pada tanggal 17 Februari 2023 piutang ini sudah diterima seluruhnya dari BUMN Pembina.

Rincian piutang jasa administrasi pinjaman sebagai berikut:

	2023	2022
DAOP 1 Jakarta	84.721.413	84.721.413
DAOP 2 Bandung	209.089.199	209.089.199
DAOP 3 Cirebon	103.983.074	103.983.074
DAOP 4 Semarang	77.217.541	77.217.541
DAOP 5 Purwokerto	65.799.415	65.799.415
DAOP 6 Yogyakarta	97.724.447	97.724.447
DAOP 7 Madiun	170.188.032	23.088.032
DAOP 8 Surabaya	38.897.363	38.897.363
DAOP 9 Jember	59.530.578	59.530.578
DIVRE I Sumatera Utara	20.619.677	20.619.677
DIVRE II Sumatera Barat	11.676.793	11.676.793
DIVRE III Palembang	40.505.116	40.505.116
DIVRE IV Tanjungkarang	34.981.671	34.981.671
Jumlah	1.014.934.319	867.834.319
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(264.929.995)	(102.979.130)
Piutang Jasa Administrasi Pinjaman Bersih	750.004.324	764.855.189

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang jasa administrasi pinjaman sebagai berikut:

	2023	2022
Saldo Awal	102.979.130	100.915.333
Penambahan Tahun Berjalan (Catatan 14)	200.103.405	30.542.767
Pemulihan Tahun Berjalan (Catatan 13)	(38.152.540)	(29.843.435)
Penyesuaian	--	1.364.465
Saldo Akhir	264.929.995	102.979.130

7. Piutang Kolaborasi Kepada BRI

Merupakan penyaluran dana kemitraan melalui kolaborasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Perjanjian Kerjasama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) No. KL.705/XII/15/KA-2022 dan No. B.63-MBD/12/2022 dengan rincian sebagai berikut:

	2023	2022
Tahap I	1.800.000.000	1.800.000.000
Tahap II	1.400.000.000	--
Tahap III	1.200.000.000	--
Tahap IV	1.200.000.000	--
Jumlah	5.600.000.000	1.800.000.000
Jasa Giro	20.336.043	--
Jumlah Penyaluran Kolaborasi kepada BRI	5.620.336.043	1.800.000.000

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Dalam Rupiah Penuh)

8. Piutang Bermasalah

Piutang bermasalah merupakan pinjaman modal kerja yang diberikan kepada mitra binaan yang masuk ke dalam piutang bermasalah dengan rincian sebagai berikut:

	2023	2022
Sektor Perdagangan	853.119.707	833.910.435
Sektor Industri	679.732.778	679.732.778
Sektor Pertanian	648.263.750	648.263.750
Sektor Jasa	458.611.697	414.417.697
Sektor Perikanan	166.587.048	166.587.048
Sektor Peternakan	150.338.626	150.338.626
Jumlah	2.956.653.606	2.893.250.334
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(2.956.653.606)	(2.893.250.334)
Piutang Bermasalah	--	--

Mutasi cadangan kerugian nilai piutang sebagai berikut:

	2023	2022
Saldo Awal	2.893.250.334	2.706.889.536
Penambahan Tahun Berjalan (Catatan 14)	63.403.272	203.596.798
Pemulihan Tahun Berjalan (Catatan 13)	--	(17.236.000)
Saldo Akhir	2.956.653.606	2.893.250.334

9. Kelebihan Pembayaran Angsuran

Merupakan kelebihan pembayaran angsuran pinjaman Mitra Binaan yang telah disetor ke Rekening Program Kemitraan yang terdiri dari:

	2023	2022
Saldo Awal	35.995.471	31.214.176
Kelebihan Pembayaran Angsuran Tahun Berjalan	13.773.742	52.201.896
Jumlah	49.769.213	83.416.072
Dikurangi: Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Angsuran	(8.428.060)	(47.420.601)
Kelebihan Pembayaran	41.341.153	35.995.471

Kelebihan pembayaran angsuran per Daerah Operasi (DAOP) dan Divisi Regional (DIVRE) sebagai berikut:

	2023	2022
DAOP 1 Jakarta	1.456.700	1.456.700
DAOP 2 Bandung	3.798.851	3.798.851
DAOP 3 Cirebon	450.898	450.898
DAOP 5 Purwokerto	9.526.160	9.498.721
DAOP 6 Yogyakarta	7.752.920	7.055.037
DAOP 7 Madiun	1.529.166	1.529.166
DAOP 8 Surabaya	12.486.929	8.368.561
DAOP 9 Jember	1.543.002	1.479.002
DIVRE I Sumatera Utara	318.044	303.533
DIVRE II Sumatera Barat	494.987	194.002
DIVRE III Palembang	1.891.000	1.857.000
DIVRE IV Tanjungkarang	92.496	4.000
Jumlah	41.341.153	35.995.471

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Dalam Rupiah Penuh)

10. Aset Neto

	2023	2022
Saldo Awal	18.508.225.063	18.343.624.370
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	(1.756.084.548)	164.600.693
Jumlah Aset Neto Akhir Tahun	16.752.140.515	18.508.225.063

11. Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman

	2023	2022
DAOP 1 Jakarta	14.780.355	6.168.711
DAOP 2 Bandung	27.824.515	103.638.534
DAOP 3 Cirebon	20.749.096	43.283.551
DAOP 4 Semarang	30.036.623	694.290
DAOP 5 Purwokerto	29.720.361	39.059.327
DAOP 6 Yogyakarta	32.734.424	19.558.242
DAOP 7 Madiun	59.550.828	133.705.475
DAOP 8 Surabaya	11.609.681	33.377.180
DAOP 9 Jember	16.377.421	28.778.776
DIVRE I Sumatera Utara	11.331.101	19.544.116
DIVRE II Sumatera Barat	5.411.245	859.732
DIVRE III Palembang	5.607.387	1.043.069
DIVRE IV Tanjungkarang	15.299.266	10.801.487
Jumlah	281.032.303	440.512.490
Pendapatan Jasa Administrasi Kolaborasi kepada BRI	20.336.043	--
Jumlah	301.368.346	440.512.490

12. Pendapatan Bunga Bank

Pendapatan bunga bank merupakan pendapatan yang berasal dari jasa giro dengan saldo pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp7.391.860 dan Rp14.828.170.

Pendapatan bunga bank berdasarkan Daerah Operasi (DAOP) dan Divisi Regional (DIVRE) sebagai berikut:

	2023	2022
Kantor Pusat	3.678.897	327.267
DAOP 1 Jakarta	161.467	252.908
DAOP 2 Bandung	556.752	3.556.795
DAOP 3 Cirebon	223.728	1.534.139
DAOP 4 Semarang	467.064	1.594.392
DAOP 5 Purwokerto	170.463	1.172.342
DAOP 6 Yogyakarta	592.226	1.718.135
DAOP 7 Madiun	791.335	885.161
DAOP 8 Surabaya	393.800	2.288.429
DAOP 9 Jember	129.616	610.075
DIVRE I Sumatera Utara	105.865	226.540
DIVRE III Palembang	39.836	147.717
DIVRE IV Tanjung Karang	80.811	514.270
Jumlah	7.391.860	14.828.170

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Dalam Rupiah Penuh)

13. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain merupakan pendapatan PUMK yang tidak dapat dikategorikan pada pos lainnya termasuk pemulihan atas piutang dengan rincian sebagai berikut:

	2023	2022
Pemulihan Penyisihan Piutang		
Piutang Pinjaman (Catatan 5)	242.039.550	643.487.102
Piutang Jasa Administrasi Pinjaman (Catatan 6)	38.152.540	29.843.435
Piutang Bermasalah (Catatan 8)	--	17.236.000
Pendapatan Lain	146.353.539	--
Jumlah Pendapatan Lain-lain	426.545.629	690.566.537

Sesuai dengan Surat Edaran Kementerian BUMN No: SE-02/MBU/Wk/2012 penetapan pedoman akuntansi PKBL Bab 7.7 termasuk dalam pendapatan lain-lain di antaranya pemulihan cadangan penyisihan piutang.

14. Beban Penyisihan Piutang

Jumlah beban penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Penyisihan Piutang Pinjaman (Catatan 5 dan 8)	2.287.070.618	676.646.030
Penyisihan Piutang Jasa Administrasi (Catatan 6)	200.103.405	30.542.767
Jumlah	2.487.174.023	707.188.797

Beban penyisihan piutang pinjaman terdiri dari piutang pinjaman lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Beban penyisihan piutang jasa administrasi terdiri dari piutang jasa administrasi lancar dan kurang lancar.

15. Beban Penghapusan Piutang Jasa Administrasi

Beban penghapusan piutang jasa administrasi merupakan penghapusan piutang jasa administrasi pinjaman yang sudah dalam kategori tidak lancar atau macet, sebagai berikut:

	2023	2022
DAOP 5 Purwokerto	--	157.253.198
DAOP 8 Surabaya	--	48.886.708
DAOP 9 Jember	--	62.384.847
Jumlah	--	268.524.753

16. Beban Administrasi Umum

Beban administrasi umum merupakan beban program kemitraan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp4.216.360 dan Rp5.592.954.

17. Perjanjian dan Perikatan

Pada 21 Desember 2022 PT Kereta Api Indonesia ("KAI") dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") sepakat melaksanakan perjanjian kerja sama tentang Pelaksanaan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan perjanjian No. KL.705/XII/15/KA-2022 dan No. B.63-MBD/12/2022.

Beberapa hal penting yang diatur dalam perjanjian tersebut adalah:

- Para pihak akan melakukan penyaluran program pendanaan UMK dengan nilai yang akan disepakati pada berita acara serah terima dana program pendanaan UMK.

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah Penuh)

- Mekanisme pelaksanaan lebih lanjut penyaluran program Pendanaan UMK akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 1. KAI melakukan penyetoran/pemindahbukuan dana program pendanaan UMK ke rekening giro BRI sesuai RKA program TJSL dan/atau ketersediaan pendanaan UMK;
 2. KAI menyampaikan bukti-bukti penyetoran/pemindahbukuan penyaluran dana program pendanaan UMK, termasuk namun tidak terbatas pada kuitansi-kuitansi dan/atau tanda terima bank kepada BRI; dan
 3. Selanjutnya BRI menyalurkan kepada UMK dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam perjanjian.
- Jangka waktu perjanjian berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 21 Desember 2022.
- Dalam hal perjanjian ini berakhir maka akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 1. BRI melaporkan kepada KAI laporan portofolio penyaluran dana PUMK yang sudah disalurkan;
 2. BRI menyetorkan kepada KAI dana pengembalian kewajiban UMK atas dana PUMK yang telah dinikmati oleh UMK; dan
 3. BRI mengembalikan kepada KAI atas dana tersedia program Pendanaan UMK yang belum disalurkan setelah KAI menyampaikan permintaan tertulis kepada BRI.

18. Peraturan Menteri BUMN yang berlaku sampai dengan Tahun Buku 2023

- a. Pada tanggal 8 September 2022 telah diterbitkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-06/MBU/09/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/04/2021 tentang program tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha milik negara Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang mulai berlaku tanggal 15 September 2022 sebagai berikut:
 - (a) Program TJSL BUMN dilakukan secara sistematis dan terpadu untuk menjamin pelaksanaan, pencapaian keberhasilan serta pengelolaan dampak Program TJSL BUMN sesuai dengan prioritas dan/atau pencapaian dari tujuan Program TJSL BUMN yang berpedoman pada rencana kerja. Program TJSL BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
 - Perencanaan;
 - Pelaksanaan;
 - Pengawasan; dan
 - Pelaporan.
 - (b) Program Pendanaan UMK dilakukan dalam bentuk:
 - Pemberian modal kerja dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah dengan jumlah pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk setiap usaha mikro dan usaha kecil paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - Pinjaman tambahan dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek paling lama 1 tahun untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha mikro dan usaha kecil dengan jumlah paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - Besarnya jasa administrasi pinjaman dana Program Pendanaan UMK menjadi sebesar 3% (tiga persen) per tahun, suku bunga flat yang setara dengan 3% (tiga persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun dengan jangka waktu/tenor pinjaman maksimal selama 3 (tiga) tahun.
 - Apabila pembiayaan dalam bentuk syariah diberikan berdasarkan prinsip jual beli maka proyeksi margin yang dihasilkan disetarakan dengan margin sebesar jasa administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasilnya untuk BUMN adalah mulai dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen) berdasarkan perjanjian.
- b. Pada tanggal 10 November 2022 telah diterbitkan surat dari Menteri Badan Usaha Milik Negara No. S-721/MBU/11/2022 tentang Kerja Sama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("Kerja Sama Program PUMK") sebagai berikut:
 - (a) Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-06/MBU/09/2022 ("PER-05/2021 jo PER-6/2022"), telah diatur bahwa:
 - Kerja Sama Program PUMK dapat dilakukan oleh BUMN dengan BUMN lain atau Anak Perusahaan BUMN yang memiliki bisnis sebagai lembaga pembiayaan dan perbankan atau memiliki kemampuan dalam menyalurkan pinjaman.

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah Penuh)

- Mekanisme kerja sama tersebut di atas, dituangkan dalam surat perjanjian dan/atau kontrak yang paling sedikit memuat hak dan kewajiban serta tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak
- (b) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan:
 - Capaian kinerja Program PUMK;
 - Sumber daya untuk menjalankan Kerja Sama Program PUMK, antara lain sistem, SDM dan teknologi informasi;
 - Fokus strategi jangka panjang pada pengembangan usaha Ultra Mikro; dan
 - Ketentuan Pasal 14 PER-05/2021 *jo* PER-6/2022 sebagaimana butir 2 di atas, yang menyatakan salah satunya bahwa Kerja Sama Program PUMK dilakukan dengan BUMN atau Anak Perusahaan BUMN yang memiliki bisnis sebagai lembaga pembiayaan dan perbankan, Maka kami merekomendasikan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") kepada BUMN dan Perusahaan dengan Kepemilikan Negara Minoritas (PKNM) sebagai pengelola Kerja Sama Program PUMK.
- (c) Pelaksanaan Kerja Sama Program PUMK dimaksud agar dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, dan sejalan dengan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*)
- c. Pada tanggal 15 November 2022 telah diterbitkan surat dari Menteri Badan Usaha Milik Negara No. S-101/DSI.MBU.B/11/2022 tentang Penyusunan Laporan Keuangan PUMK sebagai berikut:
 - (a) Sebagaimana diketahui bahwa pada pasal 23 ayat (4) Peraturan Menteri di atas disebutkan bahwa "Laporan Keuangan Program Pendanaan UMK Tahunan harus diaudit oleh kantor akuntan publik secara terpisah dari audit Laporan Keuangan BUMN yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan.
 - (b) Memperhatikan angka 1 di atas, penyajian Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022 agar tetap mengacu pada pedoman akuntansi yang diatur dalam Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE 02/MBU/Wk/2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, dengan nama Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- d. Pada tanggal 3 Maret 2023 telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No: PER-01/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara besarnya Jasa Administrasi pinjaman dapat dirinci sebagai berikut:
 - (a) 3% (tiga persen) efektif per tahun;
 - (b) suku bunga flat (tetap) yang setara dengan 3% (tiga persen) efektif per tahun; atau
 - (c) ketentuan lain yang ditetapkan Menteri,
 - (d) prinsip jual beli, maka proyeksi margin yang dihasilkan disetarakan dengan margin sebesar jasa administrasi (Pembiayaan Syariah).
 - (e) prinsip bagi hasil, maka rasio bagi hasil yang diterima BUMN mulai dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen) berdasarkan perjanjian (Pembiayaan Syariah). Jangka waktu/tenor pinjaman tersebut berlangsung paling lama 3 (tiga) tahun.
- e. Pada tanggal 21 Maret 2023 telah diterbitkan surat dari Menteri Badan Usaha Milik Negara No. S-170/MBU/03/2023 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan pada Kinerja Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2022 sebagai berikut:
 - (a) Sebagaimana diketahui, dalam rangka meningkatkan kemampuan usaha mikro dan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri, BUMN telah melaksanakan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil/UMK (dahulu Program Kemitraan) yang terdiri dari kegiatan penyaluran pinjaman dan pembinaan dari BUMN kepada mitra binaan.
 - (b) Program Pendanaan UMK tersebut menjadi bagian penilaian kinerja BUMN yang diatur melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN, dimana penilaian kinerjanya ditetapkan sebagai bagian dari penilaian dalam aspek administrasi dengan indikator efektivitas penyaluran dan tingkat kolektabilitas pengembalian pinjaman.
 - (c) Berkenaan dengan proses penataan dan simplifikasi Peraturan Menteri BUMN termasuk penyelarasan ketentuan mengenai penilaian kinerja BUMN yang di dalamnya memuat penilaian tingkat kesehatan BUMN, indikator efektivitas penyaluran dan tingkat kolektabilitas pengembalian pinjaman diberikan skor penuh atau 3 (tiga) bagi seluruh BUMN dan Perusahaan Keuangan Negara dengan Kepemilikan Minoritas (PKNM) yang menyelenggarakan Program Pendanaan UMK pada tahun 2022 sampai dengan kebijakan baru terkait tingkat kesehatan BUMN diberlakukan.

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah Penuh)

- f. Pada tanggal 4 Oktober 2023 telah diterbitkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-227/MBU/10/2023 tentang petunjuk pelaksanaan penyelesaian piutang dan/atau pembiayaan syariah bermasalah pada program usaha mikro dan usaha kecil di Badan Usaha Milik Negara sebagai berikut:
- (a) Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat melakukan penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang dan/atau pembiayaan syariah bermasalah pada usaha mikro dan usaha kecil untuk mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan kepada usaha mikro dan usaha kecil dan kepastian hukum dalam rangka penyelesaian piutang dan/atau pembiayaan syariah bermasalah.
 - (b) Direksi BUMN dapat melakukan penghapustagihan atas piutang dan/atau pembiayaan syariah bermasalah yang telah dihapusbukukan sebagaimana dimaksud dalam hal:
 - 1. Debitur/mitra binaan telah meninggal dunia;
 - 2. Debitur/mitra binaan tidak ditemukan dan telah dilakukan upaya penagihan selama 6 (enam) bulan sejak tanggal Penetapan penghapusbukuan sebagai mana dimaksud tetapi tetap tidak tertagih;
 - 3. Piutang dan/atau pembiayaan syariah bermasalah disebabkan oleh bencana alam atau bencana nonalam yang ditetapkan sebagai bencana nasional atau daerah oleh Pemerintah terkait dan telah dilakukan upaya penagihan selama 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan penghapusbukuan sebagaimana dimaksud tetapi tetap tidak tertagih; atau
 - 4. Telah dilakukan upaya penagihan selama lebih dari 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusbukuan sebagaimana dimaksud dalam tetapi tetap tidak tertagih.

19. Tanggung Jawab atas Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil merupakan tanggung jawab pengelola dan telah disetujui oleh Kepala Program PUMK PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk diterbitkan pada tanggal 22 April 2024.



PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

JL. Perintis Kemerdekaan No. 1
Bandung 40117
PO Box 1163 Bandung 40000
Telp : 022-4230031, 4230039
Teleks : 28263, 28358
Fax : 022-4203342 Toka 10039

Website : www.kai.id
Email : kontak_pelanggan@kereta-api.co.id